

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan :

- a. Pengaturan mengenai prostitusi dalam KUHP memang tidak jelas sebab pasal-pasal yang ada dalam KUHP pada umumnya sangat lemah dalam mengantisipasi secara preventif maupun represif munculnya prostitusi di masyarakat. Pasal-pasal yang ada, yang melarang orang yang pencariannya dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul dan mengambil untung dari perbuatan cabul ialah praktek germo (pasal 296 KUHP) dan mucikari (pasal 506 KUHP) agaknya kurang diantisipasi dengan berbagai pasal seperti pasal 281, 289, 290, 293 dan 294 KUHP
- b. Usaha penanggulangan masalah prostitusi dapat dibagi menjadi 2, yaitu preventif dan represif. Preventif bersifat pencegahan dan represif adalah usaha yang dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menekan (menghapus, menindas) dan usaha menyembuhkan para wanita dari ketunasiswaan, untuk kemudian membawa mereka ke jalan yang benar. Namun sepertinya penanggulangan yang bersifat represif ini tidak benar-benar dilaksanakan dalam lokalisasi pelacuran karena kegiatan yang melarang anak dibawah umur untuk melacur, menjamin kesehatan penghuni lokalisasi pelacuran, keamanan dan ketertiban, menghilangkan mata rantai penindasan,

kekerasan, eksploitasi terhadap masyarakat lokalisasi tidak lagi diperhatikan.

2. Saran

Setelah uraian kesimpulan di atas, dapat diberikan beberapa saran, yaitu :

- a. Sudah saatnya pemerintah dan masyarakat mencari solusi setelah lokalisasi, mengingat lokalisasi hanya solusi sementara. Yang perlu diingat adalah, jika pemerintah hanya sebatas melarang kegiatan prostitusi dengan undang-undang atau regulasi lain, hal itu justru akan mendorong prostitusi berlangsung secara bawah tanah. Solusi itu misalnya, dengan mengubah paradigma lokalisasi pelacuran dari tempat para pelacur menjajakan tubuhnya menjadi tempat mendidik pelacur untuk menjadi bekas pelacur.
- b. Sehubungan dengan rumitnya masalah prostitusi di masyarakat maka untuk memberantas harus dimulai dengan menghapus faktor-faktor sosio kultur yang mendukung dengan cara terus menerus melakukan penertiban di masyarakat serta melakukan pendidikan agama secara lebih intensif. Moral serta perilaku para pejabat sendiri juga harus dikontrol agar tidak mem-back up kegiatan serta usaha yang menjurus ke arah prostitusi.